

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

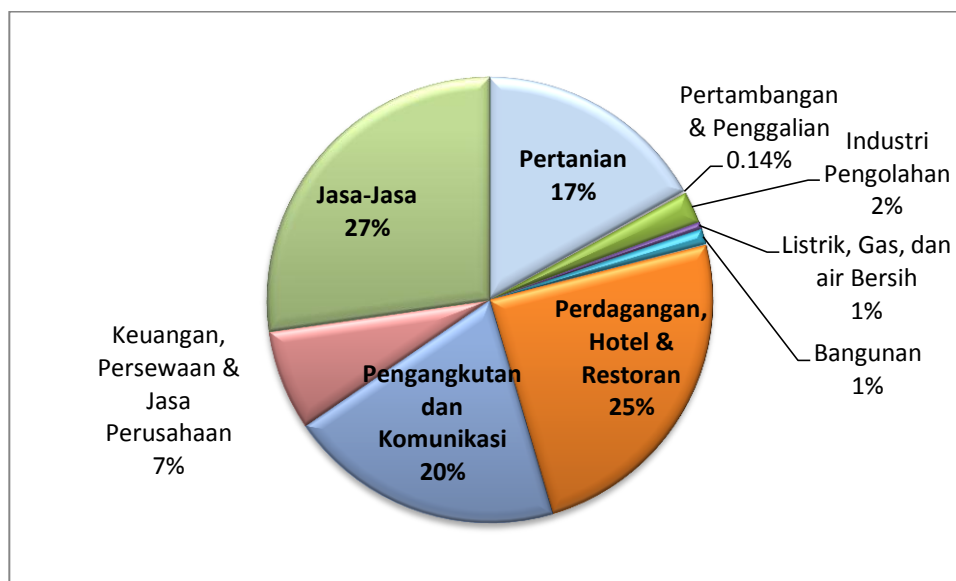
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Ambon

Kondisi perekonomian di Kota Ambon dipengaruhi oleh kondisi lokal, maupun kondisi eksternal seperti perekonomian Maluku dan Nasional.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Ambon Tahun 2013, dan Perkiraan Tahun 2014

1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Ambon sesuai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (ADHK) menurut 9 sektor lapangan usaha, menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, dan kondisi tahun 2013 masih didominasi oleh Sektor Jasa-Jasa (27%); Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (24%); Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (20%); Sektor Pertanian (17%); serta kontribusi sekitar 11% untuk 5 sektor lain yaitu Pertambangan dan Penggalian (0,14%); Industri Pengolahan (2%); Listrik, Gas, dan Air (1%); Bangunan (1%); serta Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (7%).



Sumber: BPS Kota Ambon, 2014

Gambar III.1. Struktur Ekonomi Kota Ambon Tahun 2013

Penyumbang utama sektor Jasa-Jasa adalah sub sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan sebesar 26%. Hal ini disebabkan karena kota Ambon adalah pusat kegiatan nasional, pusat pemerintahan di Provinsi Maluku, sehingga belanja pemerintahan dan belanja aparatur dari gaji Pegawai Negeri Sipil, dan TNI-POLRI tingkat Provinsi Maluku dan Kota

Ambon dilakukan di kota ini. Penyumbang lain sektor Jasa-Jasa adalah sub sektor swasta sebesar 1%.

Penyumbang utama sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran adalah sub sektor Perdagangan sebesar 22%. Hal ini disebabkan karena sebagai pusat kegiatan nasional, Kota Ambon merupakan pintu gerbang masuknya barang dari dan ke wilayah lain di Provinsi Maluku, Regional, dan Nasional. Transaksi perdagangan menjadi hidup sebagai akibat ikutan dari sub sektor Jasa Pemerintahan Umum dan Pertahanan yang belanja pemerintahan dan belanja aparatur dilakukan di kota ini. Penyumbang lain pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran adalah sub sektor hotel dan sub sektor restoran, yang masing-masing sebesar 1%.

Penyumbang utama sektor Pengangkutan dan Komunikasi adalah sub sektor Angkutan sebesar 19%. Kontribusi sub sektor angkutan dihasilkan oleh angkutan udara (8%), angkutan jalan raya (5%), angkutan laut (3%), serta angkutan penyeberangan, dan jasa penunjang angkutan yang masing-masing sebesar 1%. Posisi Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku yang ada di pulau, menyebabkan moda dan sarana transportasi menjadi sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu penggerak roda perekonomian di kota ini. Keberadaan Bandar Udara Internasional Pattimura, Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Slamet Riyadi, Dermaga Penyeberangan Halong dan Poka, serta keterhubungan dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan kota, menjadi pendorong sub sektor Angkutan bergerak dengan dinamis di Kota Ambon. Penyumbang lain pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi adalah sub sektor komunikasi sebesar 1%.

Penyumbang utama sektor Pertanian adalah sub sektor Perikanan sebesar 15%. Keberadaan pasar lokal yang menampung ikan-ikan laut tangkapan nelayan Kota Ambon dan kawasan sekitar dalam Provinsi Maluku, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Erie, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), BUMN Usaha Mina – Perikani Galala, dan perusahaan-perusahaan swasta penampung hasil tangkapan nelayan yang tersebar di Kota Ambon menyebabkan sub sektor ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Kota Ambon. Berkembangnya sub sektor ini didorong pula karena ikan laut merupakan lauk utama makanan bagi masyarakat di kota Ambon dan Maluku umumnya. Keberadaan Kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan di Indonesia, serta minat pasar nasional dan internasional terhadap ikan laut adalah pemicu sub sektor perikanan berkembang dinamis Kota Ambon. Penyumbang lain pada sektor Pertanian adalah sub sektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 1%, dan sisanya sebesar 1% disumbangkan oleh 3 sub sektor, yaitu sub sektor Tanaman Perkebunan, sub sektor Peternakan dan Hasilnya, dan sub sektor Kehutanan.

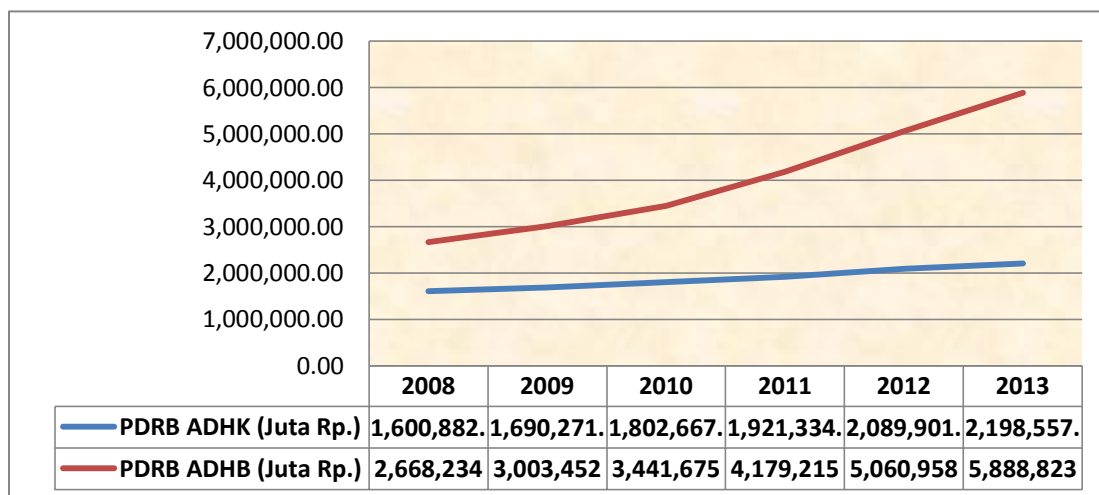
Dengan demikian, secara keseluruhan perekonomian di Kota Ambon didominasi oleh sektor-sektor tersier, yaitu Sektor Jasa-Jasa; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; serta Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; yang memberikan kontribusi sebesar 79% dari total PDRB ADHK Kota Ambon Tahun 2013. Setelah sektor-sektor tersier, perekonomian Kota Ambon didominasi oleh sektor-sektor primer, yaitu Sektor Pertanian, dan Sektor Pertambangan (sub sektor Penggalian), yang memberikan kontribusi sebesar 17,14% dari total PDRB ADHK Kota Ambon Tahun 2013. Sedangkan sektor-sektor sekunder, yaitu Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik Gas, dan Air Bersih; serta Sektor Bangunan/ Konstruksi, memberikan kontribusi sebesar 4% dari total PDRB ADHK Kota Ambon Tahun 2013.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kota Ambon selama 5 tahun belakangan cenderung tetap, sehingga untuk tahun 2014, trend struktur ekonomi diperkirakan tidak berubah jauh dari kondisi tahun 2013.

2. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Ambon selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2008, PDRB ADHK berada pada kisaran sebesar Rp.1,600 Triliun, maka pada tahun 2013 telah berjumlah sekitar Rp.2,198 Triliun, atau bertambah 37% dalam waktu 6 tahun dengan rata-rata 6,22% per tahun.

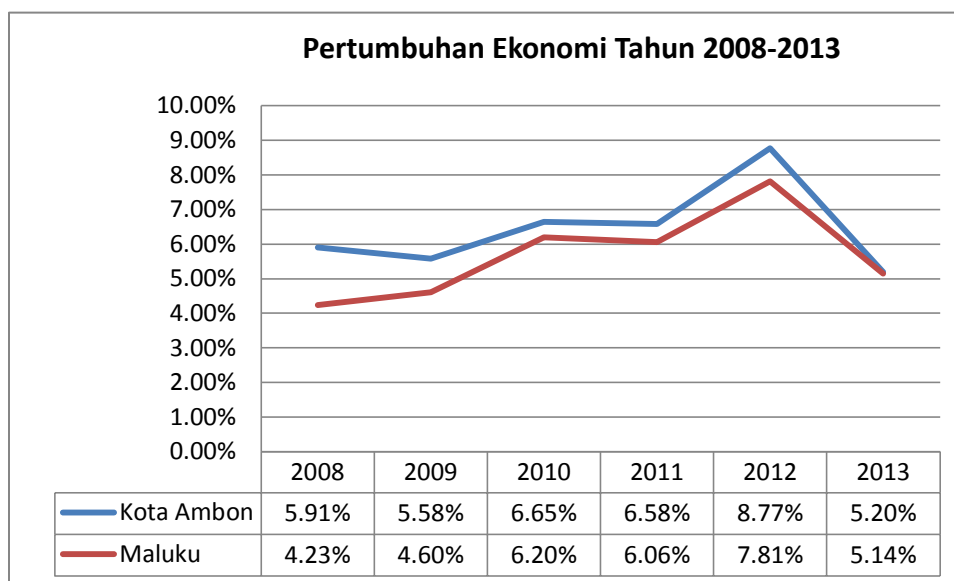
Pada sisi lain, PDRB Kota atas dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ambon selama 5 tahun terakhir, juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2008, PDRB ADHB berada pada kisaran sebesar Rp.2,668 Triliun, maka pada tahun 2013 telah berjumlah sekitar Rp.5,888 Triliun, atau bertambah 121% dalam waktu 6 tahun dengan rata-rata 20,11% per tahun.



Sumber: BPS Kota Ambon, 2014

Gambar III.2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon Tahun 2008-2013

Mengacu kepada pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2000), maka pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2012, sebesar 8,77%(Gambar III.3). Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012, sangat dipengaruhi oleh terlaksananya event-event nasional di Kota Ambon, seperti MTQ Tingkat Nasional, dan Pesarawi Mahasiswa Tingkat Nasional, yang mendorong masuknya investasi Pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana; serta berkembangnya sector perdagangan, hotel dan restoran; dan sector pertanian untuk mensukseskan penyelenggaraan ini.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Gambar III.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon dan Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

Pada tahun 2013, ekonomi Kota Ambon tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun lebih lambat dari pada tahun 2012, yaitu sebesar 5,20%. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 melambat dari tahun sebelumnya, namun semua sektor dan sub sektor tetap mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun melambat dari tahun 2012. Sektor Jasa-Jasa yang merupakan sektor basis mengalami pelambatan pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 4,32% akibat melambatnya pertumbuhan sub sector Pemerintahan Umum dan Pertahanan sebesar 4,46% dari tahun 2012 yang sebesar 9,75%. Pelambatan pertumbuhan sector basis ini, memberikan dampak ikutan pada pertumbuhan sector-sector unggulan lainnya seperti Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran melambat menjadi 6,57% dari 9,88% pada tahun 2012; Sektor Pertanian melambat menjadi 3,92% dari 9,00% pada tahun 2012; dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi melambat menjadi 6,03% dari 7,86% pada tahun 2012. Meskipun secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Kota

Ambon tahun 2013 mengalami pelambatan dibandingkan tahun 2012, namun sector Sektor Bangunan/ Kontruksi mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 9,26% pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 7,74%. Hal ini disebabkan berkembangnya aktivitas bangunan/ konstruksi, baik itu skala kecil maupun skala besar seperti pembangunan Jembatan Merah Putih.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh faktor *high-base effect*, dimana pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Ambon dan Provinsi Maluku tertinggi selama 5 tahun terakhir terkait penyelenggaraan MTQ XIV di Kota Ambon, sehingga pertumbuhan ekonomi triwulanan pada triwulan I-2013 di seluruh sektor ekonomi mengalami kontraksi. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di 2013, antara lain faktor cuaca ekstrim selama triwulan II-III-2013 termasuk bencana alam banjir dan longsor, kenaikan harga BBM bersubsidi di akhir Juni 2013, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bertahap selama tahun 2013, serta depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.

Trend pertumbuhan ekonomi Kota Ambon secara keseluruhan seirama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku (Gambar III.3). Hal ini disebabkan karena geliat perekonomian di Kota Ambon adalah penyumbang utama dari PDRB riil Provinsi Maluku. Sebagai gambaran, pada tahun 2013, PDRB ADHK Kota Ambon adalah sekitar Rp.2,198 Triliun atau 43% dari total PDRB ADHK Provinsi Maluku yang sebesar Rp.5,110 Triliun.

Mencermati kondisi ekonomi Kota Ambon pada tahun 2013, maka pada tahun 2014, perekonomian Kota Ambon diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku Triwulan I-2014, yang dilansir oleh Kantor Perwakilan Bank Indoensia Provinsi Maluku, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 mencapai Rp1,34 triliun atau tumbuh sebesar 9,77% (y.o.y), lebih tinggi daripada prakiraan (*baseline*) sebelumnya yang berada di rentang 8,50-9,50% (y.o.y). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan laporan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,21% (y.o.y).

Berkaca pada kondisi ekonomi Provinsi Maluku tersebut, kondisi ekonomi Kota Ambon selama Triwulan I-2014 diperkirakan tidak berbeda jauh, mengingat PDRB Kota Ambon memberikan kontribusi sebesar 43% dari PDRB Provinsi Maluku. Karena itu selama tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon diperkirakan mengalami pertumbuhan positif pada kisaran 5,5-6,5%. Faktor cuaca yang mendukung, penyelenggaraan pertemuan para Pastor se-Indonesia dalam Musyawarah Nasional XI UNIO Indonesia di Kota Ambon dan momentum kampanye dan penyelenggaraan Pemilu 2014

melalui belanja atribut kampanye, atribut partai politik, atribut calon legislatif, dan calon presiden juga mendorong pertumbuhan pada sektor Perdagangan Hotel dan Restoran. Sementara itu, realisasi belanja Pemerintah yang cukup optimal dan cenderung meningkat serta kelanjutan pembangunan proyek-proyek Pemerintah multi-years seperti Jembatan Merah Putih dan infrastruktur dasar lainnya, serta event Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Kota Ambon, menjadi faktor pendorong pertumbuhan di sektor jasa-jasa, yang tentunya akan menggerakkan pula pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Ambon Tahun 2015, dan Tahun 2016

Prospek perekonomian Kota Ambon pada tahun 2015 dan tahun 2016 diharapkan masih dalam pertumbuhan yang positif, pada kisaran 6,00 - 7,00%. Beberapa event penting yang diselenggarakan di Kota Ambon pada tahun 2015 seperti Mangente Ambon (Visit Ambon), Musyawarah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), event Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional di Kota Ambon maupun kegiatan-kegiatan skala nasional lainnya, diperkirakan akan mendorong tumbuhnya sector Pedagangan, Hotel, dan Restoran. Keberlanjutan proyek-proyek Pemerintah multi-years seperti Jembatan Merah Putih, Ambon Flood Management, Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, maupun infrastruktur dasar lainnya menjadi faktor pendorong pertumbuhan di sektor jasa-jasa dan memicu perkembangan sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2016, kondisi seperti ini diharapkan masih terjadi, sehingga prospek perekonomian di Kota Ambon masih dalam pertumbuhan yang positif. Keberlanjutan proyek-proyek Pemerintah multi-years seperti Ambon Flood Management, Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, maupun infrastruktur dasar lainnya menjadi faktor pendorong pertumbuhan di sektor jasa-jasa dan memicu perkembangan sektor-sektor lainnya. Pada sisi lain berkembangnya investasi swasta yang menyerap banyak tenaga kerja seperti Rumah Sakit Siloam, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon

Pada sisi lain, tantangan yang dapat dihadapi selama tahun 2015 dan 2016 sehingga dapat mengganggu roda perekonomian di Kota Ambon adalah cuaca yang ekstrim yang dapat memunculkan resiko bencana alam, seperti hujan berkepanjangan, banjir maupun longsor. Hal ini dapat mempengaruhi dapat mengurangi produktivitas sector pertanian, perikanan, dan roda ekonomi lainnya di Kota Ambon. Persaingan ekonomi global Negara-negara di Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia*

Nations) melalui melalui ASEAN Economy Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diprediksikan dapat pula mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia, termasuk Kota Ambon, dengan terbukanya perdagangan dan persaingan bebas barang dan jasa antar Negara ASEAN.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Ambon

Arah kebijakan keuangan Kota Ambon untuk tahun 2015, khususnya proyeksi keuangan serta arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Kota Ambon dan Kerangka Pendanaan

Berkaca kepada dinamika perekonomian dan kondisi keuangan daerah Kota Ambon, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016 dapat dilihat pada **Tabel III.1.**

Pada tahun 2015, pendapatan daerah Kota Ambon direncanakan sebesar Rp.990.974.966.951,- Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 10% dari target tahun 2014 yang sebesar Rp.900.509.758.731,-. Kontribusi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2015 ini disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 10%, Dana Perimbangan sebesar 74%, dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 16%. Sedangkan prakiraan maju pendapatan daerah untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.094.495.143.182,- atau meningkat 10% dari tahun 2015.

Sumbangan terbesar Dana Perimbangan bagi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2015 berasal dari Dana Alokasi Umum, yang diprediksikan sebesar Rp.658.782.100.000,- atau 67% pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum tahun 2015 ini mengalami kenaikan sebesar 9% dari tahun 2014 yang sebesar Rp.601.627.489.000,-. Komponen lain Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2015 adalah Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.28.891.858.416,- atau 3%, Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumberdaya Alam sebesar Rp.916.740.653,- atau 0,1%, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.45.444.830.000,- atau 5%.

Pada sisi lain, belanja daerah Kota Ambon tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.990.308.179.654,- Belanja ini mengalami kenaikan sebesar 9% dari target tahun 2014 yang sebesar Rp.907.658.862.907,-. Komponen belanja daerah tahun 2015 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.676.808.179.654,- atau 68%, dan Belanja Langsung sebesar Rp.313.500.000.000,- atau 32%. Sedangkan prakiraan maju belanja daerah untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.094.185.221.169,- atau meningkat 10% dari tahun 2015.

Tabel III.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016

NO	URAIAN	J U M L A H A P B D					2016***)
		2011 3	2012 4	2013*) 5	2014***) 6	2015***) 7	
1	2						8
1	PENDAPATAN	Rp 696,670,877,225	Rp 746,464,901,518	Rp 848,617,215,138	Rp 900,509,758,731	Rp 990,974,966,951	Rp 1,094,495,143,182
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 53,330,515,868	Rp 58,252,561,996	Rp 66,178,584,704	Rp 78,810,828,205	Rp 99,137,111,712	Rp 124,390,363,885
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	Rp 32,930,258,138	Rp 39,299,981,689	Rp 44,983,335,424	Rp 46,627,607,629	Rp 59,000,000,000.00	75,000,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 17,072,736,213	Rp 15,936,944,023	Rp 17,660,700,927	Rp 28,329,220,576	Rp 35,000,000,000.00	42,710,415,285.74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	Rp 281,524,139	Rp 437,705,403	Rp 525,035,726	Rp 1,249,000,000	Rp 2,137,111,711.97	3,656,722,553.60
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 3,045,997,378	Rp 2,577,930,882	Rp 3,009,512,627	Rp 2,605,000,000	Rp 3,000,000,000.00	3,023,226,045.31
1.2	Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Rp 634,661,990,357	Rp 661,994,104,881	Rp 781,169,168,494	Rp 676,946,007,326	Rp 734,035,529,069	Rp 798,073,587,642
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 31,187,658,233	Rp 42,107,852,446	Rp 34,163,447,779	Rp 28,956,947,673	Rp 28,891,858,416.00	28,941,185,499.43
1.2.2	Bagi Hasil Pajak (SDA)	Rp 921,940,757	Rp 1,525,403,435	Rp 916,740,653	Rp 916,740,653	Rp 916,740,653.00	975,306,473.08
1.2.3	Dana Alokasi Umum	Rp 411,137,994,000	Rp 497,388,862,000	Rp 551,507,941,000	Rp 601,627,489,000	Rp 658,782,100,000.00	718,072,489,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp 36,719,800,000	Rp 29,219,550,000	Rp 49,531,570,000	Rp 45,444,830,000	Rp 45,444,830,000.00	50,084,606,669.94
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 135,860,839,360	Rp 91,752,437,000	Rp 117,997,096,000	Rp -	Rp 0	0
	Dana Penyesuaian	Rp 18,833,758,007	Rp -	Rp 27,052,373,062	Rp -	Rp 0	0
	Transfer Pemerintah Provinsi						
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 8,678,371,000	Rp 26,218,234,641	Rp 1,269,461,940	Rp 144,752,923,200	Rp 157,802,326,170	Rp 172,031,191,655
1.3.1	Pendapatan Hibah	Rp 8,678,371,000	Rp 25,305,178,671	Rp 259,961,940	Rp -	Rp 0	
1.3.2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25,932,151,200	Rp 31,377,902,952.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 118,820,772,000	Rp 140,653,288,703.25
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 0	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp 913,055,970	Rp 1,009,500,000	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Lainnya						
2	BELANJA	Rp 659,484,851,082	Rp 756,207,851,019	Rp 829,655,382,747	Rp 907,658,862,907	Rp 990,308,179,654	Rp 1,094,185,221,169
2.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 471,967,256,451	Rp 535,499,760,987	Rp 587,882,115,627	Rp 634,418,533,400	Rp 676,808,179,654	Rp 749,106,448,901
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 434,460,961,437	Rp 517,069,547,948	Rp 566,980,732,071	Rp 614,406,979,150	Rp 657,484,779,654	729,878,335,321.74
2.1.2	Belanja Bunga	Rp 345,555,556	Rp 781,645,091	Rp 0	Rp 0	Rp -	-
2.1.3	Belanja Subsidi	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 323,400,000	Rp 123,400,000.00	123,400,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	Rp 18,742,439,773	Rp 6,515,115,901	Rp 9,884,427,689	Rp 12,238,154,250	Rp 10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 6,931,358,957	Rp 2,812,719,830	Rp 3,430,149,425	Rp 2,750,000,000	Rp 2,750,000,000.00	2,750,000,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota/ Desa	Rp 3,654,321,821	Rp 3,428,200,000	Rp 2,062,310,000	Rp 2,200,000,000	Rp 3,950,000,000.00	4,346,889,898.07
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp 7,732,618,907	Rp 4,792,532,217	Rp 5,424,496,442	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000	2,007,823,680.79
2.2	Belanja Langsung	Rp 187,517,594,631	Rp 220,708,090,032	Rp 241,773,267,120	Rp 273,240,329,507	Rp 313,500,000,000.00	345,078,772,268.54
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp 17,268,694,720	Rp 17,268,694,720	Rp 17,306,990,198	Rp 19,316,244,368	Rp 21,000,000,000.00	22,078,772,268.54
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 72,789,066,370	Rp 92,128,533,922	Rp 119,428,924,926	Rp 122,938,423,749	Rp 143,000,000,000.00	155,000,000,000.00
2.2.3	Belanja Modal	Rp 97,459,833,541	Rp 111,310,861,390	Rp 105,037,351,996	Rp 130,985,661,390	Rp 149,500,000,000.00	168,000,000,000.00

Lanjutan Tabel III.1		J U M L A H A P B D											
NO	URAIAN	2011		2012		2013*)		2014**)		2015***)		2016****)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	Rp 37,186,026,143	Rp (9,742,949,501)	Rp 18,961,832,391	Rp (7,149,104,176)	Rp 666,787,297	Rp 309,922,013						
3	PEMBIAYAAN DAERAH												
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 8,639,558,697	Rp 33,357,285,269	Rp 10,751,905,137	Rp 24,713,737,528	Rp 7,500,000,000	Rp 7,500,000,000						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 8,593,258,697	Rp 22,124,535,269	Rp 10,751,905,137	Rp 24,713,737,528	Rp 7,500,000,000	Rp 7,500,000,000						
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp -	Rp 11,232,750,000	Rp 0	Rp 0								
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 46,300,000	Rp -	Rp -	Rp -								
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 22,855,852,763	Rp 12,862,430,631	Rp 5,000,000,000	Rp 2,832,828,000	Rp 7,500,000,000	Rp 7,500,000,000						
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 5,000,000,000	Rp 2,500,000,000	Rp 7,500,000,000	Rp 7,500,000,000						
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	Rp 22,855,852,763	Rp 11,232,000,000	Rp 0	Rp 332,828,000	Rp -	Rp -						
3.2.5	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ke tiga	Rp -	Rp 630,430,631	Rp 0	Rp 0								
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp (14,216,294,066)	Rp 20,494,854,638	Rp 5,751,905,137	Rp 21,880,909,528	Rp -	Rp -						
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp 22,931,982,077	Rp 10,751,905,137	Rp 24,713,737,528	Rp 14,731,805,352	Rp 666,787,297	Rp 309,922,013						
	Keterangan												
	*) Angka Realisasi Sementara												
	***) Angka Target APBD												
	****) Angka Prediksi/ Prakiraan												

Berkaca kepada pendapatan dan belanja daerah Kota Ambon, maka keuangan daerah Kota Ambon pada tahun 2015, direncanakan mengalami surplus sebesar Rp.666.787.297,-. Sedangkan untuk prakiraan maju tahun 2016, mengalami surplus sebesar Rp.309.922.013,-.

Selain pendapatan dan belanja daerah, keuangan daerah Kota Ambon juga menampung pembiayaan daerah. Pada tahun 2015 dan tahun 2016, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar Rp.7.500.000.000,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015 dan 2016, direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Maluku, sebesar masing-masing Rp.7.500.000.000,-. Dengan demikian pembiayaan netto pada tahun 2015 dan 2016 direncanakan sebesar Rp.0,-.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Ambon

Kebijakan keuangan daerah Kota Ambon untuk tahun 2015 tetap diarahkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, dan belanja daerah, termasuk pembiayaan.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Ambon yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkatkan setiap tahun.

Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Ambon, antara lain:

- a. Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
- b. Terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan public, khususnya pelayanan perizinan secara lebih efektif dan efisien, sebagai kompensasi bagi pengguna jasa pelayanan terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan, yang sangat fluktuatif tergantung alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi,

maupun Pemerintah Pusat, dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat.

- e. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem Pelayanan Satu Atap, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
- f. Mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan mekanisme perencanaan pendapatan asli daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah, dan Retribusi daerah.

Pendapatan daerah Kota Ambon Tahun 2015 (**Tabel III.1**), direncanakan sebesar Rp.990.974.966.951,- yang mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun 2014.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.99.137.111.712,- atau meningkat 26% dari anggaran tahun 2014.

- 1) Pajak Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak daerah pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.59.000.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 27% dari tahun 2014. Kenaikan pajak daerah juga terjadi akibat pengalihan PBB Perkotaan dan Perdesaan dari Dana Perimbangan ke jenis penerimaan Pajak Daerah, yang telah mulai berlaku efektif sejak tahun 2014.
- 2) Retribusi Daerah meliputi imbalan atas pemakaian atau pemanfaatan jasa pelayanan Pemerintahan Kota Ambon, berupa fasilitas jasa pelayanan umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Izin Mendirikan Bangunan, retribusi di pelayanan persampahan, dan lain-lain. Retribusi daerah pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 24% dari tahun 2014.

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kota Ambon pada Bank Maluku, serta kontribusi dari PDAM Ambon dan PT. DSA. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.2.137.111.711,97 atau mengalami kenaikan sebesar 71% dari tahun 2014.
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi jenis penerimaan tertentu yang belum ditampung dalam salah satu bagian Pendapatan Asli Daerah, meliputi jasa giro, Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, jasa sewa, serta penyeteroran kembali Kas di tangan bendaharawan setelah akhir tahun anggaran. Lain-lain pendapatan asli daerah ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun 2014.
- b. Dana Perimbangan
- Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.734.035.529.069,- atau meningkat 8% dari tahun 2014.
- 1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumberdaya Alam meliputi penerimaan bagi hasil PBB, khususnya penerimaan Bagi Hasil PBB Migas, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, provisi sumberdaya hutan, penerimaan pungutan hasil perikanan, dan penerimaan dari sector pertambangan dan minyak bumi. Dana ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.29.808.599.069,- atau bertambah sebesar minus 0,22% dari tahun 2014.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan, dengan memperhatikan potensi luas wilayah, jumlah penduduk, PDRB, Indeks Konstruksi Kemahalan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil. Dana ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.658.782.100.000,- atau meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Non Reboisasi, maupun DAK bidang pendidikan, bidang kesehatan pelayanan dasar dan farmasi, bidang infrastruktur jalan, bidang air minum, bidang sanitasi,

bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang lingkungan hidup, bidang keluarga berencana, bidang transportasi darat, bidang perdagangan untuk pasar, serta bidang prasarana pemerintahan. Dana ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.45.444.830.000,- atau sama dengan tahun 2014.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pos yang menampung jenis penerimaan tertentu, yang bersumber dari Pemerintahan Atasan, meliputi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berupa penerimaan PKB, BBN-KB, dan PBB-KB; serta dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru. Dana ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.157.802.326.170,- atau meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta secara proporsional akan diarahkan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan umum, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada sisi lain, belanja daerah harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang dilakukan untuk hal ini adalah melalui efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada, serta memperlancar penyerapan anggaran dan meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah Kota Ambon Tahun 2015 (**Tabel III.1**), direncanakan sebesar Rp.990.308.179.654,- yang mengalami kenaikan sebesar 9% dari tahun 2014.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.676.808.179.654,- atau meningkat sebesar 7% dari tahun 2014.

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak dalam bentuk gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru; tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi; serta penunjang operasional, upah pungut PBB, dan insentif pajak dan retribusi. Selain itu, belanja ini digunakan pula untuk belanja representatif dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, serta tunjangan walikota dan wakil walikota. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.657.484.779.654,- atau meningkat sebesar 7% dari tahun 2014.
- 2) Belanja Subsidi dialokasikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.123.400.000,- atau meningkat sebesar minus 62% dari tahun 2014.
- 3) Belanja Hibah dianggarkan untuk pemberian uang atau barang dari Pemerintah Kota kepada masyarakat/ lembaga secara tidak wajib dan terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- atau meningkat sebesar minus 18% dari tahun 2014.
- 4) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok masyarakat dan keluarga, yang bertujuan melindungi kemungkinan terjadi resiko berupa rehabilitasi social, perlindungan social, jaminan social, penanggulangan kemiskinan, dan bencana alam. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000,- atau meningkat sebesar minus 18% dari tahun 2014.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dialokasikan untuk kebutuhan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Raja, Alokasi Dana Desa yang diperuntukan pembangunan desa, dan bantuan kepada partai politik. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.4.346.889.898,07 atau meningkat sebesar 80% dari tahun 2014.
- 6) Belanja tidak terduga diperuntukan bagi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti tanggap darurat,

penanggulangan bencana alam, dan bencana social yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000.- atau sama dengan tahun 2014.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja ini dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja Langsung pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.313.500.000.000.- atau meningkat sebesar minus 15% dari tahun 2014.

- 1) Belanja pegawai diarahkan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dan narasumber, uang lembur, kontribusi pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.21.000.000.000.- atau meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.
- 2) Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menyediakan perlengkapan penunjang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan, berupa administrasi perkantoran, pencetakan dan penggandaan; pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan; pemeliharaan kendaraan bermotor; makan dan minum; serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.143.000.000.000.- atau meningkat sebesar 16% dari tahun 2014.
- 3) Belanja modal diperuntukan bagi pembelian atau pengadaan pembangunan aset tetap berwujud, dimana nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Belanja ini dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringannya, air bersih, serta aset tetap lainnya. Belanja ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.149.500.000.000.- atau meningkat sebesar 14% dari tahun 2014.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan digunakan pula untuk menampung transaksi keuangan guna menutupi defisit antara anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau pemanfaatan dana apabila terjadi surplus anggaran dan merealisasikan pengeluaran pembiayaan yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Ambon.

Pada tahun 2015, pendapatan daerah dan belanja daerah direncanakan mengalami surplus sebesar Rp.666.787.297,-. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2015 direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sebesar Rp.7.500.000.000,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Maluku, sebesar Rp.7.500.000.000,-. Dengan demikian pembiayaan netto pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.0,-, dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 2015 sebesar Rp.666.787.297,-.